

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Tesis Magister
Program Magister Hukum
Semester Genap 2017/2018

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TANJUNGPINANG

NPM: 16105217
Mulyadi

ABSTRAK

Salah satu prioritas pemerintahan Joko Widodo saat ini adalah sektor pelayanan publik, pelayanan publik merupakan hal dasar dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Banyaknya informasi pemberitaan terkait layanan publik yang kurang memuaskan membuat pemerintahan sekarang sangat konsent untuk melakukan pembenahan. Saat ini masyarakat sudah hidup di era digital yang mana informasi dapat dengan cepat di sajikan langsung melalui *internet*. Tidak terkecuali Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang, sangat memahami dan menerima sebuah komplaint merupakan alat untuk memacu penyelenggaraan pelayanan agar lebih baik lagi. Oleh karnanya sangat penting merespon segala macam keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai alat untuk meberikan pelayanan yang terbaik.

Metode yang digunakan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (*mix method*). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif (persepsi manusia) dengan bantuan kuesioner. Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), yaitu Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP Dipilihnya penelitian hukum ini karena adanya perbedaan antara aturan hukum yang dikehendaki (Das Sollen) dengan realita yang terjadi (Das Sein) yang terjadi di BP2T Kota Tanjungpinang.

Hasil yang diperoleh belum efektifnya Permendagri No, 24 Tahun 2006 di BP2T Kota Tanjungpinang, terhadap penyelenggaraan perizinan yang ditandai dengan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang masih rendah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Terpadu Satu Pintu